

PELATIHAN PENGELOLAAN DANA DESA PADA GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE

Yusri Hazmi^{1*}, Teuku Zulkarnain², Zainal Abidin³, Abdul Halim⁴

^{1,3} *Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

^{1*}yusri.poltek@gmail.com

Abstrak - Pengelolaan dana desa dengan mengedepankan partisipatif masyarakat perlu diwujudkan. Ini sejalan dengan konsep dari pembangunan desa, yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa telah memberikan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan pemuda, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat merupakan karakteristik pembangunan desa. Sebagai bentuk kepedulian dan wujud Tridarma Perguruan Tinggi, tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe, melakukan kegiatan. Kegiatan sebagai bentuk kepedulian insan kampus guna menyelesaikan persoalan di desa. Kegiatan ini dilakukan di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang merupakan salah satu desa binaan. Dana desa sebagai instrument fiskal desa, hingga saat ini belum berkontribusi maksimal dalam menyelesaikan sejumlah persoalan. Hal ini juga terlihat dari lambatnya pembangunan desa. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan ini telah terjadi peningkatan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan, sehingga mewujudkan partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Dana desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan dana.

Abstract - Village fund management with community participation needs to be realized. This is like the concept of village development, which is community participation. Village fund management training activities have provided youth knowledge, experience and skills, so that they can increase participation and concern in village development. Community participation is a characteristic of village development. As a form of concern and manifestation of the Higher Education Tridarma, the community service team at the Lhokseumawe State Polytechnic carried out activities. Activities as a form of concern for campus people to solve problems in the village. This activity was carried out in Meunasah Mesjid Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City, which is one of the assisted villages. Village funds as a village fiscal instrument, until now have not contributed optimally in solving various problems. This can also be seen from the slow development of the village. One of the reasons is the low community participation in village development. Through this activity there has been an increase in knowledge, experience and skills, thus realizing participation in the management of village funds.

Keywords: Village Funds, Community Participation, and Fund Management.

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang konsekuensi keberadaannya dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa sebagai bukti nyata pengakuan Negara akan hak asal-usul Desa dan kewenangan yang dimiliki Desa. Dana Desa sebagai upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, menuju Desa maju dan mandiri [1]. Demikian strategis keberadaan Dana Desa, sehingga mendapat perhatian naik masyarakat maupun perguruan tinggi. Keberadaan dana menimbulkan persoalan terkait kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut, termasuk masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. salah satu poin penting terkait dengan pengelolaan dana desa disampaikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, terkait dengan evaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Hasilnya terkait dengan aspek perencanaan, penggunaan, dan pertanggung-jawaban Dana Desa yang masih minim kompetensi.

Rencana kegiatan dana desa disajikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan sebagaimana telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Proses penyusunan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan komponen dalam masyarakat. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [2]. Dalam peraturan Pemerintah tersebut diatur pula pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, yang meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban.

Kesiapan aparatur desa dalam memahami dan penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara partisipasi, terbuka dan akuntabel menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan [3]. Melalui bimbingan teknis terkait pengelolaan dana desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Perhatian pemerintah dalam upaya percepatan membangun desa seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Tentang Desa [2]. Kedua hukum ini memberikan landasan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan Dana Desa yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti: jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat desa yang meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan menjadi lebih baik. Dengan adanya dana desa, maka potensi desa yang belum tergalai dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat [4]. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Untuk meningkatkan daya guna dana desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian dana desa tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk ini dana desa perlu pengawasan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya [5].

Salah satu bagian penting dalam pengelolaan dana desa adalah perencanaan. Perencanaan menjadi panduan dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik perlu melibatkan semua aspek/elemen desa dalam perencanaan. Sehingga penggunaan dana desa menjadi optimal dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Adanya kekhawatiran pengelolaan dana desa, sebagai akibat ketidakkesiapan SDM desa dalam menjalankan program yang telah direncanakan [6]. Pemahaman yang memadai terkait dengan pengelola dana desa akan membantu dan memudahkan dalam pertanggungjawaban dana desa. Penyalahgunaan akan berakibat pada terhambatnya pencairan dana desa selanjutnya dan berpotensi terjadi pelanggaran hukum [7].

PERMASALAHAN MITRA

Gampong Meusanah Mesjid merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Tantangan pembangunan desa saat ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Padahal pengelolaan dana desa wajib mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, akuntabilitas, transparan, partisipatif dan berkeadilan. Relevan dan urgen juga bagian penting dalam pengelolaan dana desa, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Persoalan rendahnya partisipasi sebagai akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selama ini partisipasi masyarakat desa terhadap kegiatan pembangunan desa relative masih minim. Rendahnya partisipasi sebagai dampak adari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan desa [8]. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal dan sejumlah persoalan belum tertangani dengan baik. Dari diskusi awal dengan aparat desa, partisipasi masyarakat masih sangat rendah, terutama keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi ini tentunya berdampak pada kesulitan dalam penentuan skala prioritas pembangunan dan juga pertanggungjawaban dana desa. Aparatur desa perlu kerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada pemuda. Pada sisi lain, persoalan pengelolaan dana desa juga masih

membingungkan bagi aparat desa, hal ini terlihat kesulitan dalam pelaporan dana desa. Akibatnya pencairan dana desa mengalami keterlambatan dalam pengelolaan dana desa [3]. Pengelolaan dana desa sebagai bentuk bentuk dari kewajiban dalam memenuhi akuntabilitas aparat desa kepada pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat dan pemerintah [9].

Persoalan masih rendahnya partisipasi masyarakat gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pembangunan desa telah berdampak terhadap sejumlah persoalan desa yang tidak tertangani dengan baik. Padahal partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan desa: dari desa, oleh desa dan untuk desa. Ini dapat dimaknai sebagai desa yang menyelenggarakan pembangunan secara mandiri. Pemerintah pusat dalam hal ini sebatas memberi dukungan keuangan dan kewenangan bagi desa untuk dapat melaksanakan pembangunan. Ini sejalan dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yang mendorong daerah (desa) melakukan percepatan pembangunan. Desa dapat menggali, dan mengelola keuangan secara mandiri guna membiayai pembangunannya. Bentuk dukungan nyata dari pemerintah adalah kejelasan untuk mengalokasikan dana desa guna pelaksanaan pembangunan desa untuk setiap tahun [10]. Dana desa ini selanjutnya digunakan oleh aparat pemerintah desa dalam bentuk APBDes. APBDes berisi tujuan, sasaran, sumber pendanaan. APBDes bersumber dari APBN, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan APBDes dengan mengedepankan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan APBDes diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat, agar pengelolaan APBDes berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat [11]. Kesuksesan pengelolaan APBDes di tingkat desa ini diukur dari tata kelola APBDes mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dari hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2019, menyebutkan pengelolaan dana desa pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan terkait dengan pengelolaan dana desa yang belum sesuai perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara [12]. Permasalahan ini kualitas perencanaan dana desa dan belum adanya pemetaan resiko yang berdasarkan masalah dan kebutuhan desa. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal, yang selaras dengan skala prioritas kebutuhan penggunaan dana desa. Pada sisi lain pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala sebagai akibat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. kondisi yang sama juga dialami oleh Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dari hasil wawancara dengan aparat desa, masih ditemukan sejumlah persoalan yang muncul sebagai akibat ketidakpahaman, minimnya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat desa, sehingga partisipasi masyarakat masih minim. Adahal partisipasi masyarakat menjadi poin penting

dalam terwujudnya pembangunan desa. Pada sisi lain masih ditemukan sejumlah pemerintah desa yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa menjadi skala prioritas demi terwujudnya pembangunan desa. Penguatan pelahaman, ketrampilan menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan.

Solusi yang Ditawarkan

Persoalan yang dihadapi mitra selanjutnya oleh tim pengabdian kepada masyarakat politeknik Negeri Lhokseumawe melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pemuda sebagai generasi penerus pembangunan desa diharapkan peduli akan persoalan pembangunan desa. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, pada hari pertama peserta pelatihan telah mendapatkan materiterkait konsep teori dan pada hari kedua kegiatan dilakukan dalam bentuk praktek atau penyelesaian kasus.

Luaran yang Dihasilkan

Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa yang diikuti oleh pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berlangsung dalam suasana keakraban dan partisipasi yang cukup baik. adapun Luaran kegiatan yang dihasilkan dari kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa adalah: Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peserta pelatihan sehingga diharapkan akan mampu:

- Memiliki pengetahuan terkait penentuan perencanaan program kegiatan, desa.
- Memiliki pemahaman terkait dengan prosedur penyusunan APBDes.
- Mampu melakukan pengawasan pengelolaan dana desa, yang berorientasi pada APBDes
- Mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang akuntabel, partisipatif, berkeadilan.

Uraian kegiatan yang dilakukan

Dari hasil wawancara selama proses kegiatan dilakukan, permasalahan pembangunan pemerintah desa Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua kota Lhokseumawe tidak hanya dihadapi oleh sejumlah desa lain di Lhokseumawe. Permasalahan lemahnya kualitas pengelolaan dana desa telah memberi pengaruh negatif terhadap pertanggungjawaban dana yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Rasa curiga dan kurang puas masyarakat masih mewarnai setiap kegiatan musyawarah. Efek yang cukup parah yang dirasakan oleh pemerintah desa adalah terhambatnya pencairan dana pada tahun berikut (depan). Merujuk pada permasalahan yang dihadapi mitra, telah dicari solusi atas permasalahan yang terjadi. Untuk ini telah dilakukan kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa guna peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat telah meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan, sehingga upaya percepatan pembangunan desa dapat diwujudkan, sebagaimana semangat dalam undang-undang tentang desa. kegiatan pelatihan ini sebagai dalam bentuk transfer pengetahuan dan pengalaman sebagai bentuk kepedulian tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa.

Adapun solusi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa pada Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Kota Lhokseumawe. Melalui kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa diperoleh hasil sebagai berikut:

- Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat desa dan terlibat langsung (partisipasi) dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat terutama dalam pembangunan desa. Partisipasi tidak hanya sebatas melaksanakan fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, akan tetapi juga terlibat dalam kegiatan lain, seperti: musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang desa), pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya.
- Terjadinya transfer ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dari tim pengabdian masyarakat kepada peserta pelatihan, selaku penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, peserta pelatihan akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, terkait dengan pengelolaan dana Desa.

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan, maka kegiatan dapat dilakukan lebih baik terarah, sistematis, sehingga memberi manfaat kepada peserta pelatihan.

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Pada bagian ini pembarian konsep teoritis dan bukti empiris terkait dengan masalah yang terjadi. Pada bagian ini memiliki makna sebagai penentu pemilihan masalah. Selanjutnya diuraikan dan menentukan alternative penyelesaian masalah. Tahapan penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya:

- Tingkat kebutuhan dan permasalahan masyarakat,
- Jenis IPTEKS yang diterapkan,
- Kemampuan tim pengabdian kepada masyarakat,
- Manfaat dan hasil yang dicapai.

Sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat terkait dengan kegiatan pengelolaan dana desa, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam kegiatan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa selama ini lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini:

Tahap Persiapan

Untuk memperoleh hasil maksimal dari serangkaian kegiatan yang dilakukan, maka kegiatan persiapan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui persiapan, kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar sesuai rencana. Tahapan persiapan terdiri dari:

- Melakukan observasi dan wawancara dengan aparat pemerintah Gampong Meusanah Mesjid, sebagai objek sasaran kegiatan. Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh informasi awal akan kondisi mitra dan menentukan strategi penyelesaian masalah, yang akan dilakukan.
- Melaksanakan pertemuan dan diskusi dengan anggota tim pelaksana pengabdian. Kegiatan ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan

- selama kegiatan berlangsung, menetapkan materi pelatihan dan alat peraga guna meningkatkan keterampilan peserta.
- Penentuan penerima manfaat kegiatan pelatihan. Agar kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa memberikan manfaat, maka peserta pelatihan dalam kegiatan ini ditetapkan adalah pemuda Gampong Meusanah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
 - Kegiatan selanjutnya adalah menetapkan materi pelatihan, yang berhubungan pelatihan pengelolaan dana desa.
 - Penyiapan materi kegiatan terkait dengan pelatihan pengelolaan dana desa.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa kepada pemuda Gampong Meusanah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ini dilakukan di Laboratorium Anggaran dan Biaya Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan direncanakan dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2021. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni:

- Pembekalan konsep teori, yang dilakukan oleh seluruh anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Materi pembekalan konsep teori meliputi: pembangunan desa, mekanisme pengelolaan dana desa dan system penganggaran APBDes.
- Kegiatan pelatihan ini juga menggunakan alat peraga. Semua peserta pelatihan akan dibimbing langsung oleh anggota tim kegiatan pengabdian. Melalui kegiatan diharapkan akan terjadi peningkatan ketrampilan.

Rancangan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dalam kegiatan ini tidak sebatas setelah kegiatan pelatihan selesai dilakukan, akan tetapi juga dilakukan mulai dari persiapan. Adapun kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni:

- Tahap perencanaan kegiatan. Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada tahap ini digunakan untuk melakukan kordinasi, komunikasi dan memantapkan rencana kegiatan pelatihan. Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah pemuda Gampong Meusanah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Evaluasi pada bagian perencanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dapat dilakukan dengan baik pada waktu dan tempat sebagaimana yang direncanakan.
- Tahap kegiatan. Kegiatan evaluasi pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program dan umpan balik. Sehingga kualitas program pelatihan pengelolaan dana desa memberi manfaat bagi seluruh peserta kegiatan.
- Tahan akhir kegiatan. Pada kegiatan akan dilakukan evaluasi capaian kegiatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan dari seluruh program pelatihan mulai dari awal sampai dengan kegiatan selesai.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memperoleh hasil kegiatan dihadiri partisipasi mitra sebanyak 10 orang pemuda untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa yang akan dilaksanakan pada Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 hari.

Evaluasi Berkelanjutan setelah Kegiatan Selesai

Untuk kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat akan membuka akses bagi mitra kegiatan untuk dapat berdiskusi terkait dengan kegiatan pengelolaan dana desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, terutama yang berhubungan dengan fungsi pengawasan dana desa. Dari hasil kegiatan pelatihan pengawasan dana desa yang telah dilakukan, berikut ini hasil yang telah dicapai sebagai berikut:

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan pengawasan dana desa telah mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian yang dilakukan pada sesi akhir kegiatan. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan memberi pengaruh positif terhadap out pengawasan. Tekat untuk memberikan hasil yang terbaik menjadi meningkat.
- Transfer pengetahuan dan pengalaman. Melalui aktivitas pelatihan pengawasan dana desa telah terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman, baik diantara peserta maupun dengan tim pengabdian kepada masyarakat. Peserta pelatihan akan mendapatkan pengetahuan yang memadai guna melaksanakan suatu tugas. Berbagi pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh langsung dari seseorang yang telah merasakan suatu peristiwa. Pengalaman akan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan ketrampilan yang efektif. Hal ini juga akan bermanfaat dalam menentukan tindakan jika kondisi yang sama terjadi.



Gambar IV.1 Penyelesaian kasus oleh peserta pelatihan.

- Terjalinnnya hubungan yang harmonis dengan pimpinan/kepala desa. Hubungan yang serasi antara pihak yang memiliki tugas sebagai pengawas dana desa dengan kepala desa akan menciptakan sauna kerja yang aman dan nyaman. Kondisi ini akan menjadi modal kuat dalam upaya percepatan pembangunan desa. Dengan terjalinnnya hubungan yang harmonis, fungsi pengawasan dana desa akan dapat dilakukan dengan kesadaran yang kuat dan bertanggung jawab. Pimpinan desa akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tepat.
- Forum diskusi (FGD).



Gambar IV.2 Peserta pelatihan sedang mengikuti penyampaian materi oleh tim pelatihan.



Gambar IV.3 Melakukan evaluasi pasca kegiatan.

Forum ini bertujuan untuk memperoleh interaksi data dan informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok peserta pelatihan, ini berguna untuk meningkatkan pemahaman, informasi dengan menyikapi berbagai aspek suatu kejadian yang secara langsung mereka alami. Dalam FGD, interaksi diantara peserta akan membentuk informasi awal. Untuk ini setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam diskusi. Mengajukan pertanyaan, mengkritisi dan memberikan pendapat menjadi bagian penting. Pada bagian ini, setiap kelompok diwajibkan untuk dapat menyelesaikan 2 kasus yang telah disediakan. Hasil penyelesaian kasus oleh masing-masing kelompok selanjutnya disampaikan ke forum diskusi besar. forum diskusi besar dimanfaatkan untuk memperoleh kesepakatan dan keseragaman dari semua peserta terhadap penyelesaian kasus yang sebelumnya dilakukan. Untuk meningkatkan kualitas kegiatan semua anggota tim pengabdian kepada masyarakat secara intensif melakukan pendampingan, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus, yang berhubungan dengan pengawasan dana desa. Kegiatan forum diskusi juga sebagai wahana berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan terarah, setiap kelompok FGD didampingi oleh 1 anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Dari kegiatan ini tim pengabdian telah mendapatkan masukan, berupa informasi tentang masalah spesifik yang dialami oleh peserta pelatihan.

- e. Melakukan evaluasi akhir kegiatan pelatihan. Evaluasi kegiatan pelatihan ditujukan untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para peserta pelatihan, sehingga dapat diterapkan dan memberi pengaruh terhadap dirinya dan kelompok masyarakat. Sebagai bagian dari suatu proses kegiatan, evaluasi dapat menemukan dan menganalisa pencapaian tujuan. Kegiatan ini juga sebagai media untuk melakukan perbaikan dan sinkronisasi program pelatihan. Aktivitas evaluasi akhir sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi peserta pelatihan pasca kegiatan. Evaluasi kegiatan pelatihan dilakukan dengan menggunakan daftar isian. Dari kegiatan ini, tim menyimpulkan masih diperlukan kegiatan lanjutan dimasa yang akan datang.

- f. Perumusan rekomendasi.

Perumusan rekomendasi merupakan bagian penting dari suatu proses kegiatan yang dilakukan. Sebagai bagian penting dari laporan kegiatan, yang diyakini dapat meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan perubahan. Untuk ini rekomendasi yang disusun sedapat mungkin dapat menjelaskan dan memberikan skala prioritas tindakan yang harus diambil. Sehingga dapat meningkatkan kualitas sebuah aktivitas yang selama ini dilakukan, menjadi landasan melakukan evaluasi berkala dan tindakan lanjutan oleh pihak yang memiliki wewenang. Rekomendasi telah disampaikan kepada kepala desa Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe.

Luaran dari kegiatan pelatihan keuangan dana desa yang telah selesai dilakukan, selanjutnya diseminarkan dalam forum Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe pada November 2020. Secara keseluruhan melalui kegiatan ini telah terjadi transfer pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dari tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe kepada peserta pelatihan. Dari kegiatan ini telah memberi semangat untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Ini tentunya akan memberi pengaruh positif terhadap upaya percepatan pembangunan desa, yang selama ini belum dapat terselesaikan dengan baik.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pengawasan keuangan desa dilakukan yang oleh tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai bentuk dari tanggung jawab insan kampus kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Kegiatan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan masyarakat desa, terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan dana desa pada pemerintah Gampong Meunasah Mesjid Lhokseumawe yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pelatihan yang memiliki nilai guna diperlukan peran aktif seluruh peserta pelatihan dan anggota tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe, mulai dari awal kegiatan hingga selesai. Adapun beberapa hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah: (1) Dengan kegiatan pelatihan pengelolaan dana desa, para peserta pelatihan memiliki pengetahuan dan ketampilan, sehingga diharapkan partisipasi meningkat. (2) Melalui kegiatan ini diharapkan akan memberi rangsangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. (3) Melalui kegiatan ini telah meningkatkan kualitas SDM desa mengalami peningkatan.

Selama ini pembangunan desa belum sepenuhnya dapat memanfaatkan potensi dan kondisi desa. Hal ini telah memberi pengaruh terhadap pelambatan pembangunan yang

dilakukan selama ini. Pemerintah Gampong Meunasah Mesjid perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah undang-undang tentang desa, yang menyebutkan pembangunan desa adalah pembangunan dari desa dan untuk desa, yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kondisi desa.

REFERENSI

- [1] S. M. Metev and V. P. Veiko, *Laser Assisted Microtechnology*, 2nd ed., R. M. Osgood, Jr., Ed. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1998.
- [2] J. Breckling, Ed., *The Analysis of Directional Time Series: Applications to Wind Speed and Direction*, ser. Lecture Notes in Statistics. Berlin, Germany: Springer, 1989, vol. 61.
- [3] S. Zhang, C. Zhu, J. K. O. Sin, and P. K. T. Mok, "A novel ultrathin elevated channel low-temperature poly-Si TFT," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 20, pp. 569–571, Nov. 1999.
- [4] M. Wegmuller, J. P. von der Weid, P. Oberson, and N. Gisin, "High resolution fiber distributed measurements with coherent OFDR," in *Proc. ECOC'00*, 2000, paper 11.3.4, p. 109.
- [5] R. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, "High-speed digital-to-RF converter," U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.
- [6] (2002) The IEEE website. [Online]. Available: <http://www.ieee.org/>
- [7] M. Shell. (2002) IEEETran homepage on CTAN. [Online]. Available: <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/supported/IEEEtran/>
- [8] *FLEXChip Signal Processor (MC68175/D)*, Motorola, 1996.
- [9] "PDCA12-70 data sheet," Opto Speed SA, Mezzovico, Switzerland.
- [10] A. Karnik, "Performance of TCP congestion control with rate feedback: TCP/ABR and rate adaptive TCP/IP," M. Eng. thesis, Indian Institute of Science, Bangalore, India, Jan. 1999.
- [11] J. Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, "A stochastic model of TCP Reno congestion avoidance and control," Univ. of Massachusetts, Amherst, MA, CMPSCI Tech. Rep. 99-02, 1999.
- [12] *Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification*, IEEE Std. 802.11, 1997.